



RENCANA STRATEGIS
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN
TAHUN 2020 - 2024

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2020



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN
Nomor : SK. 75 /SMKKN-1/KSBTU/Sek/11/2019

TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN TAHUN 2020-2024

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut implementasi program dan kegiatan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 dan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024 serta guna mendukung pencapaian target kinerja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, perlu disusun Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020-2024 melalui keputusan Kepala SMK Kehutanan Negeri Kadipaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup

- dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MenLHK/Setjen/OTL.01/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMK KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN TENTANG RENCANA STRATEGIS SMK KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN TAHUN 2020-2024
- Pertama : Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020-2024 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Program Kerja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten dalam 1 (satu) periode lima tahunan sesuai kerangka kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) maupun rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Ketiga : Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan di lingkup SMK Kehutanan Negeri Kadipaten.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kadipaten
Pada Tanggal : 25 November 2019



Kepala Sekolah,

M. Abdul Aris

NIP. 19690506 199703 1 004

Tembusan :
Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia LHK di Jakarta;

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Bab V Pasal 15 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020-2024 merupakan gambaran yang bersifat visionable dari kinerja dan rencana kinerja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yaitu "menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang menghasilkan tenaga teknis menengah yang berakhlak mulia, berbudaya lingkungan, unggul dan siap bekerja".

Akhirnya, semoga Rancanagn Renstra ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendidikan di lingkup Kementerian LHK.



Kepala Sekolah,

M. Abdul Aris, S.Hut.,M.Si

NIP. 19690506 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi Permasalahan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten	3
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024	4
A. Visi	4
B. Misi	4
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi BP2SDM	6
B. Arah Kebijakan dan Strategi SMK Kehutanan Negeri Kadipaten	6
C. Kerangka Regulasi	9
D. Kerangka Kelembagaan	10
E. Pengarusutamaan	10
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	12
A. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Badan P2SDM	14
B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan SMK Kehutanan.....	14
BAB V. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	17
C. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	17
D. Target Kinerja	17
E. Kerangka Pendanaan.....	18
BAB VI.PENUTUP	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Spektrum kurikulum dengan perbandingan 30% untuk pelajaran A,B dan C1 serta 70% untuk pelajaran C2 dan C3	15
Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	18
Tabel 3. Rencana Alokasi Pembiayaan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi SMK Kehutanan Negeri KAdipaten.....	11
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelusuran Lulusan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2015 - 2019.....	20
Lampiran 2. Data Lulusan yang telah mengikuti Diklat Ganis.....	21

BAB I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pendirian SMK Kehutanan dilatarbelakangi oleh tujuan mulia, yaitu untuk mencetak tenaga teknis kehutanan yang mampu mengelola hutan secara lestari. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah Kesepakatan Bersama antara Menteri Kehutanan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor NK.2/Menhut-IX/2013. Turunan dari kesepakatan ini adalah Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor PKS.2/ P2SDM/SET/KUM.3/12/2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan. Kesepakatan ini memunculkan lima SMK Kehutanan, salah satunya adalah SMK Kehutanan Negeri Kadipaten.

Penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten (SMKKN Kadipaten) didasarkan pada Rencana Rencana Strategis (RENSTRA), yang disusun setiap lima tahun sekali. Dalam penyusunannya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti perubahan kebijakan nasional, standar nasional pendidikan serta hasil evaluasi diri sekolah.

Berbeda dengan RENSTRA yang telah disusun sebelumnya, Rencana STRATEGIS SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020-2024, dititikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kunci utama pembangunan sumberdaya manusia, salah satunya adalah perbaikan sistem pendidikan, terutama revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Berangkat dari alasan ini, pengelolaan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten akan ditekankan pada peningkatan kerjasama dengan para pihak, baik dalam pengembangan kurikulum, pengelolaan *teaching factory*, praktik kerja lapangan/ magang serta penyerapan lulusan.

Kerjasama dengan para pihak ini juga merupakan salah satu upaya untuk memperkecil ruang antara kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dengan lulusan SMK Kehutanan yang merupakan tenaga teknis menengah level dua di bidang kehutanan. Dengan menyelaraskan kurikulum dan penyelenggaraan

pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan DU/DI, diharapkan penyerapan tenaga kerja di bidang kehutanan akan semakin meningkat.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun oleh Tim SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, dengan arahan dan masukan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen ini juga merupakan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Peraturan Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.63/MENLHK/SEJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Struktur dan Organisasi Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri, SMK Kehutanan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat. Dan dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud, SMK Kehutanan Negeri Kadipaten memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
- c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pengajaran;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan menengah kejuruan formal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 dengan mengacu pada renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Potensi Permasalahan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten

SMK Kehutanan Negeri Kadipaten merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatannya berada dibawah pembinaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. SMK Kehutanan Negeri Kadipaten dipimpin oleh Kepala Sekolah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.01/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri, SMK Kehutanan Negeri Kadipaten mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.

2. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud, SMK Kehutanan Negeri Kadipaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran.
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar kelas.
- c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pengajaran.
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten pada tahun 2020 – 2024 masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan target tersebut, antara lain :

- a. Modul materi Pembelajaran belum sepenuhnya tersedia
- b. Kompetensi guru belum merata
- c. Materi Uji Kompetensi Keahlian peserta didik belum sempurna
- d. Peralatan pendukung pembelajaran dan praktek pembelajaran belum memadai
- e. Penerapan delapan standarisasi penyelenggaraan SMK Kehutanan belum merata

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

A. Visi

Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

B. MISI

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

mengacu pada rumusan Visi KLHK yaitu **"KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"**. serta rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan yaitu **"Meningkatkan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan"**.

Berdasarkan rumusan visi KLH serta rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Maka SMK Kehutanan Negeri Kadipaten selaku Unit Pelaksana Teknis dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM merumuskan beberapa rumusan tujuan Rencana Strategis 2020 – 2024 yaitu **"menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang menghasilkan tenaga teknis menengah yang berakhlak mulia, berbudaya lingkungan, unggul dan siap bekerja"** dan untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan beberapa misi SMK Kehutanan Negeri antara lain:

- Melaksanakan pendidikan kejuruan kehutanan yang berkualitas untuk menghasilkan tenaga teknis menengah yang mandiri, kreatif, inovatif,

kompeten dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

- Menyiapkan lulusan yang memiliki keunggulan aspek kepribadian, akademik dan kedisiplinan dilandasi wawasan kebangsaan, kebudayaan dan kebhinekaan.
- Menerapkan budaya peduli lingkungan yang berkesinambungan.
- Membina jejaring kerja dan kemitraan dengan para pihak.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi BP2SDM

Lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan. Peranan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam pembangunan tidak hanya terkait dengan produk bernilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari bidang tersebut. Namun lebih jauh dari itu, bidang lingkungan hidup dan kehutanan sangat berperan dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia dan keberlanjutan proses pembangunan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan ekonomi juga sudah bergeser tidak hanya kepada pencapaian pertumbuhan tinggi tetapi juga pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable growth*). Pertumbuhan inklusif bermakna bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi secara simultan harus berdampak pada pencapaian peningkatan kesempatan kerja, penurunan pengangguran dan kemiskinan serta menciptakan pemerataan pendapatan. Sementara itu, pertumbuhan berkelanjutan memiliki makna bahwa pertumbuhan yang dicapai mampu menjamin terjaganya segala sumberdaya produktif untuk mewujudkan pertumbuhan pada periode selanjutnya. Pertumbuhan yang dicapai harus tetap mampu menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dan sumberdaya ekonomi lainnya yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak seharusnya menyebabkan degradasi lingkungan hidup serta sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya. Pembangunan yang dilakukan justru diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya. Dalam konteks ini, kontribusi bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Dalam rancangan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 terdapat 4 sasaran strategis sebagai berikut: (1) Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim; (2) Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; (3) Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan (4) Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik. Keempat sasaran strategis tersebut merupakan perwujudan dari 4 pilar yaitu: (1) pilar lingkungan; (2) pilar ekonomi; (3) pilar sosial; dan (4) pilar tata kelola. Untuk mampu mencapai sasaran strategis dan kokohnya keempat pilar bidang lingkungan hidup dan kehutanan tersebut, maka tentu

saja sangat dibutuhkan SDM unggul yang berkualitas dan berdaya saing. Menciptakan SDM unggul di bidang LHK merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN IV 2020-2024, yaitu: "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing". Badan P2SDM merupakan Eselon 1 dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas pokok dan fungsi penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyuluhan dan pengembangan SDM bidang lingkungan hidup dan kehutanan maka peranan Badan P2SDM menjadi sangat penting. Kinerja Badan P2SDM diharapkan terus meningkat dalam mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak hanya terbatas pada tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi juga bagi instansi di tingkat pemerintahan daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Peran SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang berkualitas dan berdaya saing juga sangat diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat umum.

Pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing menjadi salah satu faktor kunci dalam menyukseskan seluruh program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Badan P2SDM dalam hal ini memiliki peran penting dalam menyediakan tenaga-tenaga profesional dan kompeten yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing membutuhkan perencanaan yang sistematis, tepat sasaran dan terukur. Oleh karena itu, program pengembangan SDM dimulai dari perencanaan program pengembangan SDM, pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, pelatihan masyarakat, penyuluhan yang transformatif dan pengembangan generasi lingkungan. Pemetaan (mapping) kondisi eksisting sangat diperlukan, khususnya terkait: (a) karakteristik dan kinerja SDM bidang LHK, (b) kinerja kelembagaan Badan P2SDM, kebijakan dan infrastruktur dalam pengembangan SDM bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dilain sisi juga perlu memetakan isu strategis, tantangan dan dinamika lingkungan strategis bidang LHK serta implikasi era disrupsi untuk memetakan kebutuhan di masa depan. Pemetaan dari dua sisi ini penting

dilakukan untuk menjawab pertanyaan mendasar yang harus dapat dirumuskan dengan baik dalam Renstra Badan P2SDM, yaitu: (1) Karakteristik dan kompetensi SDM LHK seperti apa yang dibutuhkan di masa mendatang? (2) Penguatan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam lingkup Badan P2SDM? (3) Apakah kebijakan/regulasi yang ada saat ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM bidang LHK di masa yang akan datang? (4) Sarana-prasaran dan infrastruktur apa yang perlu dikembangkan? Dari dua analisis kondisi ini (kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan sesuai kebutuhan kedepan) akan diperoleh GAP sebagai arah untuk menyusun formulasi program dan strategi hingga nanti ditetapkan target dan kegiatan. Dengan Gap Analysis dapat diidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kondisi yang diharapkan pada masa datang. Sebagai suatu metode, Gap Analysis merupakan alat evaluasi yang menekankan pada identifikasi kesenjangan kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis ini membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Dalam analisis gap juga harus mempertimbangkan waktu, biaya dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi kedepan yang diharapkan. Berdasarkan Gap Analysis maka dapat dirumuskan tujuan, sasaran dan strategi hingga formulasi program/kegiatan dan indikator kinerja program/kegiatan serta target pencapaiannya. Salah satu arahan Menteri LHK, pembangunan SDM LHK juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, yang ke depannya juga dapat mendukung program kerja Pemerintah yaitu Kartu Pra Kerja. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dilaksanakan dengan tujuan agar nantinya masyarakat yang telah dilatih dapat memiliki kompetensi yang lebih baik lagi dan dapat bersaing dalam duni kerja khususnya dunia usah adan dunia industri. Dalam rangke mewujudkan hal tersebut, strategi pembangunan SDM LHK yang dilaksanakan oleh Badan P2SDM adalah melalui segi formal (Pendidikan vokasi di SMK Kehutanan) dan Non Formal (Pelatihan Vokasi bagi SDM bidang LHK dan masyarakat). Pendidikan vokasi tingkat menengah (SMK Kehutanan) dikembangkan dengan konsep keterpaduan antara pendidikan, pelatihan, sertifikasi dan kompetensi, dimana Badan P2SDM memiliki SMK Kehutanan Negeri yang berlokasi di Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makassar dan Manokwari serta pembinaan teknis kepada SMK yang memiliki jurusan kehutanan di Indonesia. Dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing juga dilakukan penguatan kerjasama link & match antara pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) melalui program pelatihansertifikasi-kompetensi untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganis PHPL)

di unit usaha pemanfaatan hutan yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2019. Pelatihan vokasi bagi SDM bidang LHK dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kapasitas SDM tersebut melalui lembaga diklat yang ada di Badan P2SDM. Pelatihan vokasi bagi masyarakat dikembangkan dengan konsep peningkatan ketrampilan masyarakat serta dukungan sarana/prasarana tepat guna dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lestari berkelanjutan dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi produktif melalui pelatihan-sertifikasi dan kompetensi berbasis komoditas.

B. Arah Kebijakan dan Strategi SMK Kehutanan Negeri Kadipaten

Sebagai Unit Pelaksana Teknisi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Arah Kebijakan dan Strategi pengembangan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, disusun berdasarkan hasil evaluasi dan dilandaskan pada standar nasional pendidikan. Dari hasil analisis, dihasilkan beberapa strategi pengembangan dan potensi permasalahan yang ada di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, potensi permasalahan tersebut yaitu :

1. Tenaga pendidik sebagian besar belum bersertifikasi.
2. Kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan belum memenuhi standar .
3. Sistem manajemen pendidikan belum berbasis TIK.
4. Sebagian besar siswa kelas X memiliki kemampuan adaptasi dan motivasi belajar yang rendah.
5. Koordinasi dan kerjasama antara tenaga pendidik dan kependidikan terkadang masih belum baik.
6. Tenaga pendidik/ kependidikan terkadang belum memahami tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Pola pembinaan belum sepenuhnya mendukung kreatifitas dan inovasi peserta didik
8. Kemampuan literasi peserta didik masih rendah.
9. Kemampuan berkomunikasi peserta didik dalam bahasa asing masih rendah.
10. Sebagian siswa belum siap untuk bekerja/ berwirausaha jika lulus dari SMK Kehutanan Negeri Kadipaten.
11. Berada di lokasi yang iklimnya kurang kondusif (cuaca yang sangat panas di musim kemarau yang berdampak pada kekurangan air dan kekeringan).
12. Kelemahan yang dimiliki SMK Kehutanan Negeri Kadipaten meliputi:
13. Tenaga pendidik sebagian besar belum bersertifikasi.
14. Kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan belum memenuhi standar .

15. Sistem manajemen pendidikan belum berbasis TIK.
16. Sebagian besar siswa kelas X memiliki kemampuan adaptasi dan motivasi belajar yang rendah.
17. Koordinasi dan kerjasama antara tenaga pendidik dan kependidikan terkadang masih belum baik.
18. Tenaga pendidik/ kependidikan terkadang belum memahami tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
19. Pola pembinaan belum sepenuhnya mendukung kreatifitas dan inovasi peserta didik

C. Kerangka Regulasi

Berdasarkan rancangan Renstra KLHK tahun 2020-2024, kerangka regulasi disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur;
- b. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya;
- c. memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendukung kebijakan dalam RPJMN, Renstra KLHK, RKP dan Renja serta arahan Presiden;
- e. proses pembentukan regulasi harus melibatkan peran serta dari pemangku kepentingan (stakeholders).

D. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi SMK Kehutanan Negeri Kadipaten sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 17/Menlhk/Setjen/OTL.01/1/2016



Gambar 1. Struktur Organisasi SMK Kehutanan Negeri KAdipaten

SMK Kehutanan Negeri dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud, SMK Kehutanan Negeri Kadipaten memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
- c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pengajaran;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan kegiatannya pendidikan Kepala Sekolah dibantu dengan beberapa Wakil Kepala Sekolah yang masing – masing bertanggung jawab langsung terhadap Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah tersebut yaitu :

1. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu
4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Peasarana
5. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri

Dalam melaksanakan tugasnya wakil kepala sekolah dibantu dengan team dari fungsional guru dan beberapa dari staf tata usaha, sehingga proses belajar dan mengajar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dituangkan dalam rencana pembelajaran.



Gambar 2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK Kehutanan Kadipaten

E. Pengarusutamaan

Salah satu dasar kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan adalah pengarusutamaan. Kementerian LHK memiliki 6 (enam) kebijakan pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif untuk mencapai target-target pembangunan nasional, yaitu:

1. Kesetaraan gender Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian LHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Kebijakan percepatan pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian LHK antara lain melalui: (a) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (b) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (c) Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (d) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (f) Penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender; (g) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG. Badan P2SDM sejak tahun 2015 telah aktif dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender. Lembaga diklat yang ada saat ini sudah mulai menyediakan sarana prasarana yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Saat ini Badan P2SDM juga mulai mengembangkan kriteria lembaga diklat yang responsif gender, termasuk di dalamnya metode dan kurikulum yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat.
2. Tata kelola pemerintahan yang baik Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah, meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Pembangunan berkelanjutan Kebijakan Kementerian LHK dalam pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya, dan mengejawantahkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah.
4. Kerentanan bencana dan perubahan iklim

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kementerian LHK dalam mengurangi kerentanan bencana, yaitu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebencanaan, mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat, mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil, sebagai upaya penanganan bencana. Peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) pada sektor-sektor prioritas yaitu (1) ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (2) ketahanan iklim sektor air; (3) ketahanan iklim sektor pertanian; serta (4) ketahanan iklim sektor kesehatan.

5. Modal sosial dan budaya

Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan pada 4 (empat) program prioritas, yaitu: (1) Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, (2) Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, (3) Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, (4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.

6. Transformasi digital

Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Mengoptimalkan pengelolaan Big Data. Badan P2SDM akan sepenuhnya berkomitmen untuk dapat mewujudkan keenam kebijakan pada setiap pengarusutamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Badan P2SDM

Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah yang mencerminkan berfungsinya keluaran. Sasaran kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Badan Penyuluhan pada Tahun 2020-2024 melaksanakan kegiatan melalui Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sasaran utama program adalah Meningkatnya Daya Saing SDM LHK. Badan P2SDM mendukung sasaran strategis 4 Kementerian LHK yaitu "Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)". Untuk mendukung keberhasilan tujuan dari sasaran Badan P2SDM tersebut maka SMK Kehutanan Negeri Kadipaten memiliki target indikator kinerja kegiatan yang dijabarkan di bawah ini.

B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan SMK Kehutanan

Berdasarkan program pada Badan P2SDM, terdapat enam kegiatan pada lingkup Badan P2SDM. SMK Kehutanan Negeri Kadipaten selaku UPT dari BP2SDM mendapatkan Indikator Kinerja Kegiatan pada poin 3 yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan dengan sasaran kegiatan Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat. Target lulusan yang dituangkan dalam IKK dapat dilihat pada rincian target IKK setiap tahunnya pada BAB V Rencana Strategis ini.

Dari hasil evaluasi diri sekolah yang diselaraskan dengan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan, diperoleh strategi pengembangan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, seperti yang tersaji pada Tabel 1. Dari seluruh strategi pengembangan, terdapat beberapa strategi yang menjadi fokus pengembangan, seperti yang dipaparkan berikut ini.

1. Pengembangan Kurikulum dan Pelaksanaan Pembelajaran yang Efektif dan Efisien

Untuk mengoptimalkan kompetensi peserta didik di bidang kehutanan, SMK Kehutanan telah mengadakan berbagai kegiatan pengembangan kurikulum, diantaranya kegiatan pengembangan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi dasar, penyusunan silabus serta revitalisasi kurikulum. Dalam

revitalisasi kurikulum, selain mengusulkan kompetensi yang lebih relevan, juga dilakukan perubahan beban pelajaran. Sebelumnya, perbandingan pelajaran A, B dan C1 dibandingkan dengan C2 dan C3 adalah 45:55. Sedangkan pada tahun ajaran berikutnya, direncanakan perbandingannya adalah 30:70, dengan rincian seperti disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 1. Spektrum kurikulum dengan perbandingan 30% untuk pelajaran A,B dan C1 serta 70% untuk pelajaran C2 dan C3.

Mata Pelajaran	KELAS/ SEMESTER					
	X		XI		XII	
	1	2	1	2	1	2
A. Muatan Nasional						
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	2	2	2	2	2	2
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	1	1	1	1	1
3. Bahasa Indonesia	2	2	2	2	2	2
4. Matematika	3	3	3	3	4	4
5. Sejarah Indonesia	1	1	-	-	-	-
6. Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya	2	2	2	2	3	3
B. Muatan Kewilayahan						
1. Seni Budaya	2	2	-	-	-	-
2. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	2	2	1	1	-	-
Jumlah A dan B	15	15	11	11	12	12
C. Muatan peminatan kejuruan						
C1. Dasar bidang keahlian						
1. Simulasi dan komunikasi digital	2	2	-	-	-	-
2. Fisika	1	1	-	-	-	-
3. Biologi	2	2	-	-	-	-
4. Kimia	1	1	-	-	-	-
C2. Dasar Program keahlian						
1. Pembinaan Hutan	6	6	-	-	-	-
2. Pengukuran Hutan	6	6	-	-	-	-
3. Perlindungan hutan	6	6	-	-	-	-
4. PKWU	8	8				
C3. Kompetensi Keahlian						
Paket Keahlian Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan						
1. Aplikasi SIG	-	-	10	10	9	9
2. Inventarisasi Hutan	-	-	9	9	9	9
3. Pengukuran dan pemetaan digital	-	-	9	9	9	9
4. Produk kreatif dan kewirausahaan	-	-	9	9	8	8
Paket Keahlian Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan						
1. Inventarisasi Keanekaragaman Hayati	-	-	10	10	9	9
2. Pembinaan Habitat dan Populasi	-	-	9	9	9	9
3. Ekowisata	-	-	9	9	9	9
4. Produk kreatif dan kewirausahaan	-	-	9	9	8	8

Mata Pelajaran	KELAS/ SEMESTER					
	X		XI		XII	
	1	2	1	2	1	2
Paket Keahlian Teknik Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan						
1.Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan	-	-	10	10	9	9
2.Konservasi tanah dan air	-	-	9	9	9	9
3.Agroforestry	-	-	9	9	9	9
4.Produk kreatif dan kewirausahaan	-	-	9	9	8	8
Paket Keahlian Teknik Produksi Hasil Hutan						
1.Inventarisasi Pada Hutan Produksi Sebelum Penebangan	-	-	10	10	-	-
2.Inventarisasi Pada Hutan Produksi Setelah Penebangan	-	-	-	-	9	9
3.Pembukaan wilayah hutan produksi	-	-	9	9		-
4.Pemanenan hasil hutan produksi	-	-	-	-	9	9
5.Pengujian kayu bulat	-	-	9	9	-	-
6.Pengujian kayu gergajian	-	-	-	-	9	9
7.Produk kreatif dan kewirausahaan	-	-	9	9	8	8
Jumlah C	32	32	37	37	35	35
Muatan Lokal						
Pendidikan Lingkungan Hidup					1	1
Total	47	47	48	48	48	48

2. Rekrutmen Peserta Didik Baru
3. Pola Pembinaan Peserta Didik



Gambar 3. Pembinaan siswa dalam pengembangan unit produksi

4. Pengembangan Kerjasama
5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana
7. Sertifikasi Lulusan

BAB V. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Perumusan sasaran program dan kegiatan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten disusun dengan mengacu dari sasaran strategis Badan P2SDM yang telah disusun. Program dan Kegiatan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten mendukung Sasaran Strategis 4 "Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing". Sebagai penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis BP2SDM dengan sasaran program dan sasaran kegiatan SMK Kehutanan disusun peta cascading BP2SDM dimana SMK Kehutanan berada pada IKU-19 Indek Produktivitas Daya Saing SDM LHK yaitu Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK dengan output 09 yaitu Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan Bersertifikat.

B. Target Kinerja

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan menengah kejuruan formal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), oleh karena itu dalam penyusunan Renstra SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020 – 2024 penting memperhatikan capaian sasaran kegiatan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan.

Untuk mendukung sasaran program kegiatan tersebut diatas, SMK Kehutanan memiliki 1 Kegiatan yaitu Penyelenggaraan pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan dengan sasaran kegiatan Tersedianya Jumlah tenaga Teknis Menengah Kehutanan, dengan adanya Kegiatan dan sasaran Kegiatan tersebut diatas selanjutnya hal tersebut dijabarkan dalam unit kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra, selanjutnya unit kegiatan tersebut dijabarkan lagi dalam elemen kegiatan. Matrik Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Keg.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (satuan)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN							
	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (orang)	97	98	99	107	102

C. Kerangka Pendanaan

Rencana alokasi anggaran SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020-2024 untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan sekitar Rp. 115.720.000.000,- untuk memenuhi sasaran kegiatan, dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Rencana Alokasi Pembiayaan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Milyar Rupiah)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan	20,52	21,38	22,20	24,32	21,80	110,22

Alokasi anggaran di atas merupakan pembiayaan melalui mekanisme APBN Kementerian LHK, Kebijakan peningkatan alokasi pendanaan tahun 2020-2024 dibandingkan alokasi 2015-2019 didasarkan pada rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi yang juga merupakan kebijakan Pemerintah guna mensejahterakan masyarakat.

BAB VI. PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan pedoman dan arahan pelaksanaan penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten selaku UPT dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada hal-hal tertentu rencana ini masih memerlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam rencana yang lebih rinci dan cakupan masa perencanaannya yang lebih pendek.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi pedoman yang baik dan diaplikasikan secara konsisten serta terus dimonitor pencapaian pelaksanaannya. Perlu disadari bahwa masa perencanaan ini hanya lima tahun, sedangkan kebijakan pemerintah akan terus berubah dan mengarah kepada perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Sehingga pengendalian terhadap ketercapaian rencana ini perlu terus dilakukan agar tetap sinkron dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Lampiran 1. Data Penelusuran Lulusan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2015 - 2019

No	TahunLulus	Sebaran Lulusan							Jumlah	Keterserapan (%)		
		ASN	BUMN	Bakti Rimbawan	Kontrak	Karyawan Swasta	Kuliah	Tidak ada Informasi/blm Bekerja		Bekerja	Kuliah	Tidak Bekerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
1	2015	1	28	23	3	-	-	3	-	58	94,83	5,17
2	2016	15	3	25	20	18	1	21	53	156	52,56	13,46
3	2017	6		8	25	13	2	31	12	97	55,67	31,96
4	2018	2	1	-	34	13	2	17	37	106	49,06	16,04
5	2019	-	1	-	23	13	-	28	29	94	39,36	29,79
Total	24	33	56	105	57	5	100	131	511	54,79	19,57	25,64

Lampiran 2. Lulusan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten yang telah mengikuti Diklat Ganis

1. DATA LULUSAN SMK DIKLAT GANIS PHPL PENGUKURAN DAN PEMETAAN

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	INSTANSI PENGIRIM
1	2	3	4
1	Annisa Nur Hasanah	Rembang, 16 Juli 1997	SMKKN Kadipaten
2	Atef Franseda	Majalengka, 20 Agustus 1993	SMKKN Kadipaten
3	Bangkit Indra Cahyanto	Majalengka, 04 September 2000	SMKKN Kadipaten
4	Corina Aprilia	Majalengka, 16 April 1995	SMKKN Kadipaten
5	Dede Wahyu Rahayu	Sumedang, 23 Agustus 1993	SMKKN Kadipaten
6	Dendi Nur Ramadani	Cilacap, 31 Desember 1998	SMKKN Kadipaten
7	Dian Aysri Tri Hutaminingsih	Bogor, 28 Desember 1999	SMKKN Kadipaten
8	Diki Warohim	Sumedang, 22 Juli 1995	SMKKN Kadipaten
9	Dimas Albantani	Pandeglang, 22 Maret 2000	SMKKN Kadipaten
10	Eko Septyaningrum	Blora, 04 September 2000	SMKKN Kadipaten
11	Enrico Firgiawan Havier	Cirebon, 01 Juni 2001	SMKKN Kadipaten
12	Faishal Abdul Matin	Garut, 08 November 2000	SMKKN Kadipaten
13	Firda Triguna Salam	Tasikmalaya, 20 Juni 1995	SMKKN Kadipaten
14	Galih Tectona	Blitar, 09 Juni 1999	SMKKN Kadipaten
15	Gathis Raesha Ramadhani	Pemalang, 26 November 2001	SMKKN Kadipaten
16	Ichal Aprianda Subarnas	Sumbawa Besar, 26 Juli 2001	SMKKN Kadipaten
17	Ilham Akbar Maulana Achmad	Banjarnegara, 31 Juli 2000	SMKKN Kadipaten
18	Iqbal Nugraha Fadilah	Sumedang, 13 November 1997	SMKKN Kadipaten
19	M. Isnan Maulana Taufik	Jakarta, 02 Oktober 1995	SMKKN Kadipaten
20	Moch. Fikri Aditya Mulyawan	Bogor, 28 April 2000	SMKKN Kadipaten
21	Muhamad Akbar Faturohman	Sumedang, 03 Mei 2000	SMKKN Kadipaten

22	Muhamad Fadlan Yusuf	Majalengka, 09 September 2001	SMKKN Kadipaten
23	Ramadhany Fathahillah S	Tuban, 22 Desember 1999	SMKKN Kadipaten
24	Randi Suteja	Tasikmalaya, 26 Juli 1993	SMKKN Kadipaten
25	Riko Septian Dwi Sasongko	Cilacap, 01 September 1994	SMKKN Kadipaten
26	Rizal Fadillah	Tasikmalaya, 23 Juli 1999	SMKKN Kadipaten
27	Rizma Adi Pramesta	Garut, 09 Juni 2000	SMKKN Kadipaten
28	Rizqi Febriyadi	Metro, 18 Februari 2001	SMKKN Kadipaten
29	Sergie Regyatama Zwageri	Majalengka, 02 April 1998	SMKKN Kadipaten
30	Zachoni Adi Marta	Ponorogo, 20 Maret 1998	SMKKN Kadipaten

2. DATA LULUSAN SMK DIKLAT GANIS PHPL PEMANDU WISATA

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	INSTANSI PENGIRIM
1	2	3	4
1	Alek Cahwono	Banyuwangi, 27 Juli 2000	SMKKN Kadipaten
2	Alfikri Farhan Novanto	Kupang, 15 November 1999	SMKKN Kadipaten
3	Ari Susilo	Cirebon, 04 Agustus 2000	SMKKN Kadipaten
4	Diah Risma Aryani	Bantul, 11 November 2001	SMKKN Kadipaten
5	Dika Cipta Alfauzan	Bandung, 15 Desember 1999	SMKKN Kadipaten
6	Dimas Calvin Arya Pratama	Purwokerto, 05 Desember 2001	SMKKN Kadipaten
7	Enjang Ibnu Hajar	Majalengka, 14 Juli 1994	SMKKN Kadipaten
8	Fahmi Ahmad Fauzi	Sumedang, 06 Maret 2000	SMKKN Kadipaten
9	Fajar Tamyid Makbuloh	Sumedang, 15 September 1995	SMKKN Kadipaten
10	Fransisca Villian Irina Wangga	Majalengka, 26 Januari 1994	SMKKN Kadipaten
11	Fudhoil	Makassar, 11 Januari 2001	SMKKN Kadipaten
12	Hanif Salamudin	Purbalingga, 10 Februari 2000	SMKKN Kadipaten
13	Kaisar Dewa Pamungkas	Kuningan, 24 Agustus 1999	SMKKN Kadipaten
14	Kharisma Alhadi	Subang, 21 Mei 2000	SMKKN Kadipaten
15	Luqmanulhakim	Binjai, 24 Mei 2001	SMKKN Kadipaten
16	M. Rico Sadewa	Semarang, 08 Oktober 2000	SMKKN Kadipaten
17	Mahissa Deva Revangga	Dompu, 28 Oktober 2000	SMKKN Kadipaten
18	Mohamad Sobarul Firmansyah	Tasikmalaya, 13 Juli 2000	SMKKN Kadipaten
19	Muhamad Hasbi Adzikri	Tasikmalaya, 12 Oktober 1999	SMKKN Kadipaten
20	Muhammad Adirun	Maros, 18 Oktober 1995	SMKKN Kadipaten
21	Muhamad Agung F. Rosidin	Majalengka,	SMKKN Kadipaten
22	Muhammad Ananta Nuryansyah	Surabaya, 19 Juli 2000	SMKKN Kadipaten

23	Muhammad Farid Idrus	Majalengka, 18 Juli 2000	SMKKN Kadipaten
24	Muhammad Galih Aditio	Kuningan, 21 November 2001	SMKKN Kadipaten
25	Muhammad Nashrulloh	Bandung, 10 Januari 1994	SMKKN Kadipaten
26	Nuril Islami	Surabaya, 07 September 2000	SMKKN Kadipaten
27	Ratih Aprillia Kariani	Bogor, 05 April 1997	SMKKN Kadipaten
28	Restu Singgih	Tasikmalaya, 13 Desember 1995	SMKKN Kadipaten
29	Rifki Ramadan	Cirebon, 12 November 1999	SMKKN Kadipaten
30	Roby Saputra	Majalengka, 01 Desember 1999	SMKKN Kadipaten
31	Shafira Khairunnisa	Majalengka, 09 September 1995	SMKKN Kadipaten
32	Tatang Gumelar	Garut, 19 Februari 1999	SMKKN Kadipaten
33	Yogi Andika	Pasuruan, 24 Juni 1997	SMKKN Kadipaten

3. DATA LULUSAN SMK DIKLAT GANIS PHPL PEMBINAAN HUTAN

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	INSTANSI PENGIRIM
1	2	3	4
1	Abdul Syukur	Majalengka, 02 April 1994	SMKKN Kadipaten
2	Abimanyu Setawan Putra	Jakarta, 23 Maret 2001	SMKKN Kadipaten
3	Ade Abdulah	Brebes, 09 Juli 1997	SMKKN Kadipaten
4	Andi Desta Hartanto	Tuban, 29 Desember 1997	SMKKN Kadipaten
5	Aris Rohman Setianto	Banyumas, 07 Mei 2001	SMKKN Kadipaten
6	Arum Budi Utami	Magelang, 29 Maret 1998	SMKKN Kadipaten
7	Catur Novanda Putra Simatupang	Sleman, 17 November 2000	SMKKN Kadipaten
8	Deasta Wahyu Bhyantari	Cilacap, 21 Mei 2001	SMKKN Kadipaten
9	Fahmi Naufal Martiadi	Garut, 18 Maret 1999	SMKKN Kadipaten
10	Fajar Tirta Ramadhan	Bogor, 10 Desember 1999	SMKKN Kadipaten
11	Habibul Amal	Brebes, 24 April 2000	SMKKN Kadipaten
12	Ilham Yasir Ramadhan	Ciamis, 26 Januari 1997	SMKKN Kadipaten
13	Iwan Saputra	Sumedang, 01 November 1998	SMKKN Kadipaten
14	M Fardhan Pratama	Majalengka, 15 Desember 2000	SMKKN Kadipaten
15	Muhammad Nurdin Fitriana	Kupang, 28 Januari 1998	SMKKN Kadipaten
16	Mentari Galuh Putri	Bandar Lampung, 09 Desember 1992	SMKKN Kadipaten
17	Muhammad Alif Septiana	Bogor, 30 September 2000	SMKKN Kadipaten
18	Rahmi Latipatul Hasanah	Sukabumi, 02 Maret 1996	SMKKN Kadipaten
19	Rizky Agustina Ningrum	Demak, 23 Agustus 1997	SMKKN Kadipaten
20	Roni Rohendi	Sumedang, 26 Agustus 1996	SMKKN Kadipaten
21	Sabdo Aji Santosa	Bantul, 10 September 1997	SMKKN Kadipaten
22	Wiguna Candra Saputra	Majalengka, 21 Desember 1993	SMKKN Kadipaten

4. DATA LULUSAN SMK DIKLAT GANIS PHPL PENGUJIAN KAYU BULAT RIMBA

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	INSTANSI PENGIRIM
1	2	3	4
1	Amelia Hanifah	Bandung, 12 Juli 2001	SMKKN Kadipaten
2	Arfian Eka Syahputra	Malang, 14 Maret 2000	SMKKN Kadipaten
3	Edi Djuhaedi	Sumedang, 09 Februari 2001	SMKKN Kadipaten
4	Gilang Dwi Ramadhani	Tuban, 22 Desember 2000	SMKKN Kadipaten
5	Ivan Fahlevi Prihatmoko	Jombang, 23 Oktober 2000	SMKKN Kadipaten
6	Kevin Imtinan Fawwaz	Brebes, 13 Oktober 2001	SMKKN Kadipaten
7	M. Bachrudin Mufti	Sidoarjo, 14 April 2000	SMKKN Kadipaten
8	Made Windu Dwipayana	Badung, 31 Desember 2001	SMKKN Kadipaten
9	Mega Kurniawan	Jember, 05 Januari 2000	SMKKN Kadipaten
10	Muhammad Jiwalutfy MR	Tasikmalaya, 09 Januari 2001	SMKKN Kadipaten
11	Nova Trio Permana	Majalengka, 31 Maret 2001	SMKKN Kadipaten
12	Nurul Huda Amirul Latif	Banjarnegara, 20 Maret 2001	SMKKN Kadipaten
13	Sandi Nugraha	Majalengka, 07 April 2001	SMKKN Kadipaten
14	Sri Rusmiati	Bogor, 02 Agustus 2001	SMKKN Kadipaten
15	Utama Aji Lacsana	Gunungkidul, 25 Juli 1999	SMKKN Kadipaten